



Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Sumatera Bagian Selatan)

 Arta Pradana^{1*}, Sunardi², Muhammad Fahmi³
^{1,2,3}Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

 *Corresponding Author: artapradana29@gmail.com | Phone Number: 0823 7786 7508

 DOI: <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.6802>

ARTICLE INFO

Received: 23-03-2022

Received in revised: 26-04-2022

Accepted: 18-05-2022

Available online: 09-09-2022

KEYWORDS

the size of local government;
 prosperity;
 intergovernmental revenue;
 internal control system;
 local government financial performance

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the characteristics of the local government and internal control system on the financial performance of the local government in the districts/cities of the province of South Sumatra, Lampung, Bengkulu, Jambi, and the Bangka Belitung Islands. The population in this study was 60 regions/cities in the provinces of South Sumatra, Lampung, Bengkulu, Jambi, and Bangka Belitung Islands, with the sampling method determined was the saturated sample. The data used is secondary data in the form of LKPD for the year 2017-2019. The data collection method in this research is the documentation method. The data analysis method used is descriptive statistical analysis method, classical assumption test, and multiple linear regression, as well as data processing in this research using SPSS 16.0 (Statistical Product and Service Solution) statistical computer program. The results of this study can be concluded that jointly (f test) the variables of local government size, prosperity, intergovernmental revenue, and internal control systems have a simultaneous effect on the financial performance of local governments in the districts/cities of the provinces of South Sumatra, Lampung, Bengkulu, Jambi, and the archipelago. Bangka Belitung. Partially (t-test) shows that the size of local governments, intergovernmental revenue, and internal control systems have no effect on the financial performance of local governments, while prosperity has a significant effect on the financial performance of local governments in the districts/cities of the provinces of South Sumatra, Lampung, Bengkulu, Jambi, and the islands. Bangka Belitung).

PENDAHULUAN

Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu karakteristik pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi pemerintahan tersebut. Tatas (2018). Dalam pemerintahan Ukuran pemerintah yang besar akan memberikan suatu kemudahan dalam kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mega (2019). Kemakmuran pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rizki (2017). Undang-Undang 4 No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. *Intergovernmental revenue* adalah bagian dari pendapatan yang dihasilkan lingkungan eksternal dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada transfer Pemerintah pusat. *Intergovernmental Revenue* lebih dikenal dengan dana perimbangan. Tatas (2018). Sistem pengendalian intern adalah rencana yang mencakup struktur organisasi dan semua metode dan alat yang terkoordinasi yang digunakan di perusahaan dengan tujuan menjaga keamanan aset/aset perusahaan, memverifikasi keakuratan dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan Mempromosikan kepatuhan manajemen kebijakan yang telah ditetapkan. (Yuhanis, 2019 : 543).

Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung, fenomena variabel ukuran pemerintah daerah dan kemakmuran daerah pada provinsi Bengkulu, sepanjang tahun 2017,2018 dan 2019 memiliki total aset dan PAD yang tinggi tetapi rasio efektivitasnya rendah atau kurang efektif, berbanding terbalik pada provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017,2018, dan 2019 memiliki total aset dan PAD yang rendah tetapi memiliki rasio efektivitas yang tinggi atau sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pemerintah daerah yang memiliki total aset dan PAD yang tinggi memiliki rasio efektivitas yang tinggi, sebaliknya tidak semua pemerintah provinsi yang memiliki total aset dan PAD yang rendah memiliki rasio efektivitas yang rendah.

Fenomena variabel *Intergovernmental Revenue* pada provinsi Lampung tahun 2019 memiliki total dana perimbangan yang rendah tetapi memiliki rasio efektivitas yang tinggi, berbanding terbalik dengan provinsi Bengkulu tahun 2017, 2018 dan 2019 memiliki total dana perimbangan yang tinggi tetapi rasio efektivitas rendah atau kurang efektif. Hal ini disimpulkan bahwa tidak semua provinsi yang memiliki total dana perimbangan yang tinggi memiliki rasio efektivitas yang tinggi, sebaliknya tidak semua provinsi yang memiliki total dana perimbangan yang rendah memiliki rasio efektivitas yang rendah.

Fenomena variabel sistem pengendalian intern pada provinsi Bengkulu tahun 2018 dan 2019 jumlah temuan kelemahan SPI terus menurun tetapi rasio efektivitasnya rendah atau kurang efektif, berbanding terbalik pada provinsi Jambi tahun 2018, 2019 dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 memiliki jumlah temuan kelemahan SPI yang mengalami kenaikan jumlah temuan tetapi rasio efektivitasnya tinggi atau sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua provinsi yang memiliki jumlah temuan kelemahan SPI yang rendah memiliki rasio efektivitas yang tinggi, sebaliknya tidak semua provinsi yang memiliki jumlah temuan kelemahan SPI yang tinggi memiliki rasio efektivitas yang rendah atau kurang efektif.

Akhila (2020) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Aulia (2017) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Lim dkk (2019) menyatakan bahwa kemakmuran berpengaruh positif terhadap kinerja penyenggaraan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mega (2019) menyatakan bahwa kemakmuran daerah tidak mempengaruhi kinerja pemerintahan provinsi.

Tatas (2018) menyatakan bahwa *Intergovernmental Revenue* mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memanfaatkan dana transfer pusat secara maksimal. Berbeda dengan penelitian Nurfika (2019) menyatakan bahwa *Intergovernmental Revenue* tidak mempunyai berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Sumatera Utara.

Safrida (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada kantor kabupaten Aceh Utara dan Instansi pemerintah. Penelitian Welly (2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Berbeda dengan penelitian Oka (2017) menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan terhadap penetapan opini audit atas laporan keuangan daerah BPK. Penelitian M. Firza (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Sumatera Bagian Selatan).

TINJAUAN TEORI

Karakteristik Pemerintah Daerah

Aulia (2017) menyatakan bahwa karakteristik pemerintah daerah adalah ciri khas pemerintah daerah yang menjadi ciri dan pembeda suatu daerah dengan daerah lainnya. Hasil penelitian Aulia menunjukkan bahwa kemakmuran dan belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja. Karakteristik pemerintah daerah adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah dan menjadi pembeda dengan daerah lain. Raimundo (2017). Hasil penelitian Raimundo menunjukkan bahwa umur administratif pemerintah daerah dan opini audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara itu, ukuran, *leverage*, ketergantungan, dan belanja daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Karakteristik pemerintah daerah ialah identitas yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah yang terdapat perbedaan dengan daerah lainnya. Mega (2019). Hasil penelitian mega menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah dan opini audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah provinsi, sedangkan kemakmuran daerah dan belanja modal tidak mempengaruhi kinerja pemerintah provinsi.

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu karakteristik pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi pemerintahan tersebut. Tatas (2018). Noviyanto dan Kiswanto (2016) menyatakan bahwa Ukuran (size) pemerintah daerah merupakan besar kecilnya objek dari pemerintah daerah tersebut. Mega (2019) menyatakan bahwa Ukuran pemerintah daerah yang besar dapat *berkontributif* untuk kegiatan operasional pemerintah daerah yang diikuti dengan peningkatan *performance* keuangan pemerintah daerah. Ni Made (2016) Size yang besar pada suatu pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan kegiatan ataupun program-program pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

Kemakmuran

Lim dkk (2019) Kemakmuran merupakan kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya. Tingkat kemakmuran daerah di tunjukkan oleh PAD. Kemakmuran pemerintah daerah dapat diukur dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Novianti dan Kismanto (2016) menyatakan bahwa tingkat kekayaan atau kemakmuran daerah di cerminkan dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Kemakmuran pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rizki (2017).

UU No. 33 tahun 2004 pasal 1, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Tujuan Pendapatan Asli Daerah

adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Kemakmuran dianggap mampu mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dari total pendapatan asli daerah (PAD).

Intergovernmental Revenue

Intergovernmental revenue merupakan bagian dari pendapatan yang berasal dari lingkungan eksternal dan besarnya ketergantungan Pemerintah Daerah dari transfer pemerintah pusat. *Intergovernmental Revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan. Tatas (2018). *Intergovernmental Revenue* merupakan biaya yang dialokasikan dari pemerintah pusat ke daerah yang hendak digunakan untuk membiayai aktivitas daerah tersebut agar tercapainya tujuan pemerintah daerah untuk menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik. Helen (2021). Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dana perimbangan ini terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam), dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu: keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum/peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan efisiensi operasi. (Mulyadi, 2016: 180). Yuhanis (2019: 43) Sistem pengendalian Intern adalah rencana yang mencakup struktur organisasi dan semua metode dan alat terkoordinasi yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan menjaga keamanan properti perusahaan, memverifikasi keakuratan dan kebenaran data akuntansi, mempromosikan dan berkontribusi pada efisiensi, untuk mempromosikan kepatuhan dengan yang ditetapkan. pedoman manajemen.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern dengan menggunakan jumlah temuan SPI sebagai indikator. Dewi (2020). semakin sedikit jumlah temuan kelamahan spi menggambarkan semakin baik kinerja keuangan suatu daerah.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Noviyanto dan Kiswanto (2016) menyatakan bahwa Ukuran (size) pemerintah daerah merupakan besar kecilnya objek dari pemerintah daerah tersebut. Mega (2019) menyatakan bahwa Ukuran pemerintah daerah yang besar dapat *berkontributif* untuk kegiatan operasional pemerintah daerah yang diikuti dengan peningkatan *performance* keuangan pemerintah daerah. Ni Made (2016) Size yang besar pada suatu pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan kegiatan ataupun program-program pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Akhila (2020) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki dampak positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya ukuran pemerintah daerah yang besar, pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan akuntabilitas karena ukuran pemerintah daerah yang besar juga akan diikuti dengan sebuah resiko penyalahgunaan yang besar pula. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari penjelasan diatas hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Kemakmuran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Lim dkk (2019) Kemakmuran merupakan kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya. Tingkat kemakmuran daerah di tunjukkan oleh PAD. Kemakmuran dari pemerintah daerah dapat dilihat dari pendapatan asli daerah (PAD). Novianti dan Kismanto (2016) menyatakan bahwa tingkat kekayaan atau kemakmuran daerah di cerminkan dengan peningkatan pendapatan asli daerah. UU No. 33 tahun 2004 pasal 1, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku, Tujuan Pendapatan Asli Daerah adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Kemakmuran dianggap mampu mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dari total pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah kekayaan daerah yang optimal dapat mencerminkan suatu daerah yang mampu mengenali potensi di daerah dan akan mendukung kinerja pemerintah daerah. Aulia (2017) dan Lim dkk (2019) menyatakan bahwa kemakmuran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari penjelasan diatas hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2 : Kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi,

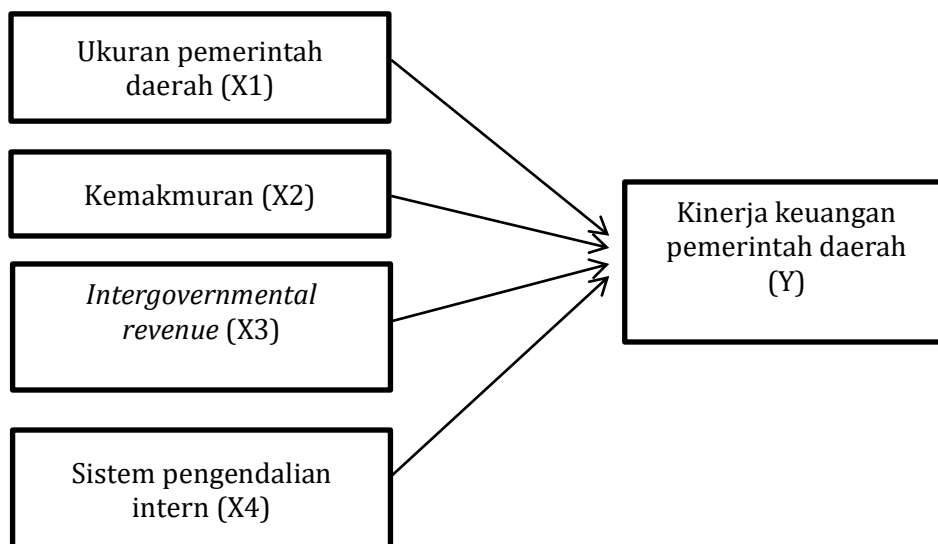
dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dana perimbangan ini terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam), dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tatas dkk (2018) menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga semakin banyak jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat berarti menunjukkan semakin besar dana yang diperoleh untuk membiayai tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada publik yang lebih baik. Dari penjelasan diatas hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H3 : *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Yuhanis (2019: 43) Sistem pengendalian internal adalah rencana yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat terkoordinasi yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan menjaga keamanan properti perusahaan, memverifikasi keakuratan dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan untuk berkontribusi pada kepatuhan dengan peraturan yang sesuai Kebijakan manajemen telah ditetapkan. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern dengan menggunakan jumlah temuan SPI sebagai indikator. Dewi (2020). semakin sedikit jumlah temuan kelaianan spi menggambarkan semakin baik kinerja keuangan suatu daerah. Safrida (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari penjelasan diatas hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H4 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota 36 provinsi Sumatera Selatan, kabupaten/kota provinsi Lampung, kabupaten/kota provinsi Bengkulu, kabupaten/kota Provinsi Jambi dan Kabupaten/kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2019 sebanyak 60 kabupaten/ kota.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel dependen (Y) kinerja keuangan pemerintah daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah dengan realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan sebagai indikator. Aulia (2017). Penelitian ini kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan rasio efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.(Mardiasmo,2009: 134).

$$\text{Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah} = (\text{Realisasi pendapatan}) / (\text{anggaran pendapatan})$$

Variabel independen (X1) ukuran pemerintah daerah

Penelitian Ukuran pemerintah daerah diukur dengan logaritma natural total aset. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian. Dewi (2020).

$$\text{Ukuran pemerintah daerah} = \text{Log. n (Total aset)}$$

Variabel independen (X2) kemakmuran

Penelitian kemakmuran diukur dengan logaritma natural PAD. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian Lim dkk (2019).

$$\text{Kemakmuran} = \text{Log. n (PAD)}$$

Variabel independen (X3) *intergovernmental revenue*

Penelitian kemakmuran diukur dengan total dana perimbangan dan total pendapatan. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian Tatas (2018).

$$\text{Intergovernmental Revenue} = \text{Total Dana Perimbangan} / \text{Total pendapatan}$$

Variabel independen (X4) *sistem pengendalian intern*

Penelitian sistem pengendalian intern diukur dengan menggunakan jumlah temuan SPI. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian Dewi (2020).

$$\text{SPI} = \text{Jumlah temuan SPI}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data yang digunakan dalam

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
UKP	180	12.05	13.21	12.3493	0.19953
KM	180	10.3	12.04	10.9641	0.32246
IR	180	10.72	86.44	72.6927	7.80975
SPI	180	8	55	20.1111	7.69523
KKPI	180	14.64	113.16	96.9631	7.93822
Valid N (listwise)	180				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Dalam **tabel 1.** Terdiri dari N yaitu jumlah penelitian sebanyak 180 sampel, minimum menjelaskan tentang nilai terendah dalam penelitian, maksimum menjelaskan tentang nilai tertinggi, rata-rata (mean) adalah keseluruhan data yang dijumlahkan dan hasilnya dibagi dengan jumlah data, standar deviasi ialah akar kuadrat dari penyimpangan nilai data dengan nilai mean dibagi banyaknya data.

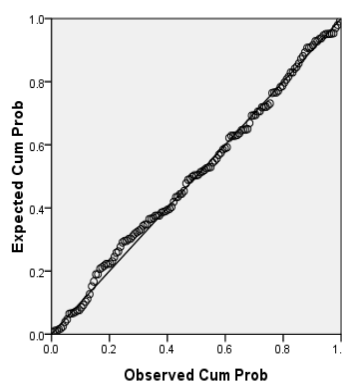
Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau kedua-duanya terdistribusi normal atau tidak. Regresi dikatakan baik jika nilai residual yang berdistribusi mendekati normal atau normal. Terdapat dua cara untuk mengukur apakah nilai residual normal atau tidak. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah



Gambar 1. Uji Normalitas (Normal P-P plot)

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Uji multikolonieritas

Uji multikolonieritas adalah ditemukannya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel idnependen pada model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Dapat dilihat nilai VIF dari variabel-variabel tersebut < 10 atau tidak ada variabel bebas yang memiliki variance inflitation factor (VIF) di atas 10 dan nilai tolerance dari variabel-variabel tersebut >0,1 sehingga disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolonieritas

Model		Coefficients ^a	
		Tolerance	Collinearity Statistics VIF
1	Ukuran Pemerintah Daerah	0.55	1.818
	Kemakmuran	0.481	2.08
	Intergovernmental Revenue	0.681	1.468
	Sistem Pengendalian Intern	0.959	1.042

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Uji autokorelasi

Berdasarkan tabel 3 diketahui nilai DW yaitu 1,447 selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai table Durbin Watson dimana jumlah sampel N = 141 dan jumlah Variabel K = 4 maka di peroleh DU 1,7835 dan 5-DU 3,2165 maka ditarik kesimpulan DW < 5-DU dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

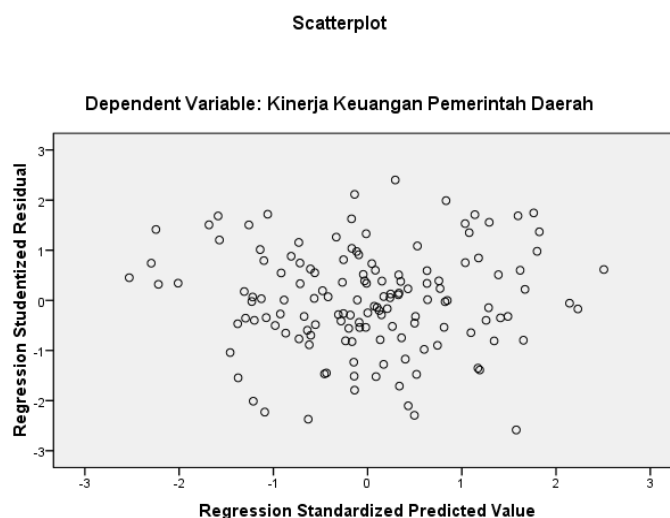
Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.269 ^a	0.072	0.045	2.65562	1.447

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern, Intergovernmental Revenue, Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran
 b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Uji heteroskedastisitas

Dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Pada gambar *scatterplot* tersebut dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Analisis Regresi Linier Berganda

uji regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized	
		Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	72.169	23.102
	UKP	-0.072	2.021
	KM	2.555	1.136
	IR	-0.006	0.06
	SPI	-0.04	0.037

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Dari Tabel 4 maka persamaan model regresi linier berganda diatas dapat diperoleh sebagai berikut:

$$KKPD = 72,169 - 0,072 + 2,555 - 0,006 - 0,040 + e$$

Dari persamaan analisis regresi linier tersebut maka dapat diketahui:

1. Konstanta sebesar 72,169 artinya variabel UPD, KM, IR dan SPI di anggap konstan (bernilai 0), maka nilai KKPD_UPD 72,169.
2. Nilai koefisien regresi UPD sebesar -0,072 menunjukkan hubungan negatif (terbalik) yang memberi arti bahwa setiap kenaikan UPD sebesar 1% maka menyebabkan KKPD menurun sebesar -0,072 dengan asumsi variabel lain adalah konstan (*Ceteris paribus*).
3. Nilai koefisien regresi KM sebesar 2,555 menunjukkan hubungan positif (searah) yang memberi arti bahwa setiap kenaikan KM sebesar 1% maka menyebabkan KKPD meningkat sebesar 2,555 dengan asumsi variabel lain adalah konstan (*Ceteris paribus*).
4. Nilai koefisien regresi IR sebesar -0,006 menunjukkan hubungan negatif (terbalik) yang memberi arti bahwa setiap kenaikan IR sebesar 1% maka menyebabkan KKPD menurun sebesar -0,006 dengan asumsi variabel lain adalah konstan (*Ceteris paribus*).
5. Nilai koefisien regresi SPI sebesar -0,040 menunjukkan hubungan negatif (terbalik) yang memberi arti bahwa setiap kenaikan SPI sebesar 1% maka menyebabkan KKPD menurun sebesar -0,040 dengan asumsi variabel lain adalah konstan (*Ceteris paribus*).

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Berikut hasil pengujian uji F

Tabel 5. Uji F

Variabel	F	Sig.	Kesimpulan
Ukuran Pemerintah daerah, Kemakmuran, Intergovernmental revenue dan Sistem Pengendalian Inter	2.656	.036 ^a	Berpengaruh

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

PEMBAHASAN

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah (X1) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah (UKP) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dilihat dari tingkat signifikansi ukuran pemerintah daerah (UKP) sebesar 0,971 artinya lebih besar dari pada 0,05. Dengan demikian penelitian ini menolak H1 yang berarti bahwa ukuran pemerintah daerah (UKP) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Secara teoritis besar kecilnya ukuran pemerintah daerah dipengaruhi oleh total aset, hal ini menunjukkan semakin besar total aset suatu daerah, maka semakin besar ukuran pemerintah daerah, sebaliknya semakin kecil total aset suatu daerah semakin kecil pula ukuran pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah yang besar dapat *berkontributif* untuk kegiatan operasional pemerintah daerah yang diikuti dengan peningkatan *performance* keuangan pemerintah daerah. Mega (2019). Terkait hal ini disebabkan total aset pemerintah daerah belum memberikan kontribusi dan berfungsi sebagaimana mestinya dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, aset tetap yang lebih dominan dari pada aset lancar. Aset tetap yang dimiliki oleh daerah kurang produktif untuk meningkatkan daya saing daerah. Hal tersebut berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin besar total aset suatu daerah maka semakin besar peluang pemerintah

daerah dalam meningkatkan kinerjanya dengan memanfaatkan aset daerah yang dimiliki secara optimal untuk pendapatan daerah.

Penelitian ini mendukung penelitian Aulia (2017) dan Tatas (2018) dengan hasil penelitian bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Lim (2019), Mega (2019), Akhila (2020) dengan hasil penelitian ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian ini bertolak belakang dengan teori yang sudah ada dan mendukung penelitian sebelumnya, ukuran pemerintah daerah banyak yang tidak berpengaruh. Hasil penelitian ini membuktikan sejalan dengan penelitian sebelumnya tetapi tidak sejalan dengan teori yang sudah ada.

Pengaruh Kemakmuran (X2) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan kemakmuran (KM) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi kemakmuran (KM) sebesar 0,026 artinya lebih kecil dari pada 0,05. Dengan demikian penelitian ini menerima H1 yang berarti bahwa ukuran pemerintah daerah (UKP) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kemakmuran pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rizki (2017). PAD (pendapatan asli daerah) diharapkan mampu untuk meningkatkan kemakmuran daerah, sehingga mempunyai dampak meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemakmuran daerah cenderung semakin baik jika jumlah PAD tinggi, sebaliknya Kemakmuran daerah cenderung semakin buruk jika jumlah PAD rendah.

Penelitian ini mendukung penelitian Aulia (2017) dan Lim dkk (2019) yang menyatakan bahwa kemakmuran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian ini Berbeda dengan penelitian Farah (2018) dan Mega (2019) menyatakan bahwa kemakmuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* (X3) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwa *Intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi *Intergovernmental revenue* (IR) sebesar 0,926 artinya lebih besar dari pada 0,05. Dengan demikian penelitian ini menolak H1 yang berarti bahwa *Intergovernmental revenue* (IR) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Intergovernmental revenue* merupakan bagian dari pendapatan yang berasal dari lingkungan eksternal dan besarnya ketergantungan Pemerintah Daerah dari transfer pemerintah pusat. *Intergovernmental Revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan. Tatas (2018).

Secara teoritis Semakin besar jumlah penerimaan transfer dari pemerintah pusat berarti semakin besar dana yang diperoleh dalam membiayai tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Terkait hal ini disebabkan oleh jumlah total dana perimbangan yang lebih kecil dibandingkan dengan total pendapatan sehingga persentase tidak mencapai 100%. Sehingga menyebabkan tidak tercapainya pembiayaan untuk tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.

Penelitian ini mendukung penelitian Rizki (2017) Nurfika (2019) menyatakan bahwa *Intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun berbeda dengan penelitian Tatas (2018) dan Lim (2019) yang menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian ini bertolak belakang dengan teori yang sudah ada dan mendukung penelitian sebelumnya, *intergovernmental revenue* daerah banyak yang tidak berpengaruh. Hasil penelitian ini membuktikan sejalan dengan penelitian sebelumnya tetapi tidak sejalan dengan teori yang sudah ada.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (X4) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi sistem pengendalian intern (SPI) sebesar 0,277 artinya lebih besar dari pada 0,05. Dengan demikian penelitian ini menolak H1 yang berarti bahwa sistem pengendalian intern (SPI) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sistem pengendalian intern menggunakan jumlah temuan kelemahan Sistem pengendalian intern sebagai alat pengukuran. Dewi (2020). kecenderungannya semakin sedikit jumlah temuan SPI di setiap provinsi maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya semakin banyak jumlah temuan SPI di setiap provinsi maka semakin buruk kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian mendukung penelitian M.Firza (2018) dan Oka (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Safrida (2017) dan Welly (2021) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian ini bertolak belakang dengan teori yang sudah ada dan mendukung penelitian sebelumnya, sistem pengendalian intern daerah banyak yang tidak berpengaruh. Hasil penelitian ini membuktikan sejalan dengan penelitian sebelumnya tetapi tidak sejalan dengan teori yang sudah ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pengujian hasil penelitian dan pembahasan, maka dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran Pemerintah Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi SUMBAGSEL (Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung). hal ini disebabkan total aset pemerintah daerah belum memberikan kontribusi dan berfungsi sebagaimana mestinya

dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, aset tetap yang lebih dominan dari pada aset lancar. Aset tetap yang dimiliki oleh daerah kurang produktif untuk meningkatkan daya saing daerah. Hal tersebut berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin besar total aset suatu daerah maka semakin besar peluang pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya dengan memanfaatkan aset daerah yang dimiliki secara optimal untuk pendapatan daerah.

2. Kemakmuran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi SUMBAGSEL (Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung). Variabel kemakmuran memiliki koefisien 2,248 dengan nilai signifikansi 0,026, maka semakin besar jumlah PAD (pendapatan asli daerah) suatu daerah maka semakin baik tingkat kemakmuran daerah semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. *Intergovernmental Revenue* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi SUMBAGSEL (Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung). Terkait hal ini disebabkan oleh jumlah total dana perimbangan yang lebih kecil dibandingkan dengan total pendapatan sehingga persentase tidak mencapai 100%. Sehingga menyebabkan tidak tercapainya pembiayaan untuk tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4. Sistem Pengendalian Intern secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi SUMBAGSEL (Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung). Jumlah temuan kelemahan spi yang memiliki koefisiensi regresi negatif sebesar -1,092 dengan nilai signifikansi 0,277, maka semakin banyaknya jumlah temuan kelemahan spi menggambarkan semakin buruknya kinerja keuangan suatu daerah.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah dan mengembangkan lagi dengan variabel lain. Selanjutnya penambahan sampel penelitian dapat dilakukan menggunakan proksi lain selain rasio efektivitas dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah diantaranya rasio efisisensi, rasio kemandirian, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan.

REFERENSI

- Akhila Santika Kirana. (2020). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Indonesia Tahun 2018). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*, 8 (2) : 175-192.
- Aulia Rizka Kusuma. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6 (1) : 2460-0585.
- Dewi Sari. (2020). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi tidak dipublikasikan*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Helen Andaresta, Khairul Aswar dan Ermawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Size Pemerintah Daerah Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*. 2 (1) : 1614-1624.
- Lim Nur Aminah, Nunuv Nur Afiah, dan Arie Pratama. (2019). Pengaruh *Size, Wealth, Intergovernmental Revenue* dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *SIKAP*, 3 (2) : 147-165.
- Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi 4). Yogyakarta: ANDI
- Mega Andani, Sarwani, Novita Weningtyas Respati (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 9 (2) : 111-130.
- M.Firza Alfi dan Puja Rizqy Ramadhan, (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota. *Jurnal studi Akuntansi dan Keuangan*, 2 (3) : 103-104.
- Mulyadi (2016). *Auditing* (Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.
- Ni Made Suryaningsih dan Eka Ardhani Sisdyanti. (2016). Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15 (2) : 1453-1481.
- Nur dan Kiswanto (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5 (1) : 2252-6765.
- Nurfika Irmawati Purba. (2018). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue, Ukuran Legislatif Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Sumatera Utara*. Skripsi tidak diterbitkan. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Oka Purnawan Widodo dan Sudarno. (2017). Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Dan Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6 (1) 2337-3806.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

- Raimundo Patria Hayu Sasmita. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit BPK Terhadap *Understandability* Dalam Kualitas Laporan Keuangan. *MODUS* 33 (1) : 98-119.
- Rizki Hamdani. (2017). *Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kemakmuran Pemerintah, Ukuran Legislatif, Dana Transfer Pemerintah Pusat Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di 90 Indonesia*. Skripsi tidak diterbitkan. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Romie Priyastama. (2017). *The Book of SPSS Pengolahan dan Analisis Data*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Safrida Hanum, Edi Zukfiar dan Neo Agustina. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*, (3) : 86-96
- Tatas Ridho Nugrohodan dan Novi Eko Prasetyo. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur. *ASSETS Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 7 (1) : 27-34.
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- V. Wiratna Sujarweni (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres.
- Welly. (2021). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja organisasi perangkat daerah di provinsi sumatera selatan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18 (1) : 2662-1845.
- Yuhanis Ladewi. (2019). *Sistem Informasi Akuntansi I* (Edisi 5). Palembang: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.